



**Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang**

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAYAPURA**

PERIODE 31 DESEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan KPKNL Jayapura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Jayapura. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jayapura, 07 Mei 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Daniel H.P. Panggabean



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
Lampiran dan Daftar	48



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA**

Gedung Keuangan Negara Jayapura, JL. A. Yani No.8, Kel. Gurabesi, Kec. Jayapura
Utara, Kota Jayapura
Telepon : 0967-534641 Faksimili : 0967-536827, Email kpknljayapura11@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2024 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, 07 Mei 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Daniel H.P. Panggabean



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan IV TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4,992,160,105 atau mencapai 117% persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp 4,280,562,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp 3,192,596,188 atau mencapai 96% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3,331,357,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per Triwulan IV 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 6,041,213,336 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 99,953,533; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 5,941,259,803; dan Aset Lainnya sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 23,014,679 dan Rp 6,018,198,657.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4,880,525,205 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp2,696,604,412 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp 2,183,920,793.

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 2,295,555,693.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp5,522,206,881 ditambah Surplus-LO sebesar Rp2,295,555,693 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1,799,563,917, sehingga terdapat kenaikan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp495,991,776. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dengan jumlah sebesar Rp3.192.596.188 dikurang akun Ditagihkan Dari Entitas Lain dengan jumlah sebesar Rp4.992.160.105. Akun Ditagihkan Ke Entitas Lain merupakan realisasi belanja, sedangkan Akun Ditagihkan Dari Entitas Lain merupakan realisasi pendapatan.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan

berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

CATATAN	Triwulan IV TA 2024			Triwulan IV TA 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg	ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg
B.1	4.280.562.000	4.992.160.105	117	5.503.317.000	6.196.360.065	113
	4.280.562.000	4.992.160.105	117	5.503.317.000	6.196.360.065	113
B.2.						
B.3	-	-		-	-	
B.4	2.424.367.000	2.285.610.188	94	1.935.010.000	1.718.285.617	89
B.5	906.990.000	906.986.000	100	356.399.000	343.999.000	0
	3.331.357.000	3.192.596.188	96	2.291.409.000	2.062.284.617	90
	3.331.357.000	3.192.596.188	96	2.291.409.000	2.062.284.617	90

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA NERACA

PER 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Triwulan IV TA 2024	Triwulan IV TA 2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya dan Setara Kas		
Piutang PNB		
Bagian Lancar TP/TGR		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek		
Belanja Dibayar di Muka	12.500.000	12.500.000
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		
Persediaan	72.487.533	80.454.975
Jumlah Aset Lancar	84.987.533	92.954.975
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan TP/TGR	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-
ASET TETAP		
Tanah	2.564.512.000	2.564.512.000
Peralatan dan Mesin	3.841.904.123	3.142.218.123
Gedung dan Bangunan	2.520.226.000	2.520.226.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.000.000	2.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.987.382.320)	(2.798.010.335)
Jumlah Aset Tetap	5.941.259.803	5.430.945.788
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	-	-
Aset Lain-Lain	-	157.750.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	-	(157.750.000)
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	6.026.247.336,00	5.523.900.763,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Uang Muka dari KPPN		
Utang kepada Pihak Ketiga	23.014.679	1.693.882
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	23.014.679	1.693.882
JUMLAH KEWAJIBAN	23.014.679	1.693.882
EKUITAS		
Ekuitas	6.018.198.657	5.522.206.881
JUMLAH EKUITAS	6.018.198.657	5.522.206.881
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.041.213.336	5.523.900.763

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	Triwulan IV TA 2024	Triwulan IV TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	4.880.525.205	6.196.360.065
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		4.880.525.205	6.196.360.065
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	
Beban Persediaan	D.3	97.531.142	123.529.325
Beban Barang dan Jasa	D.4	914.832.839	834.904.217
Beban Pemeliharaan	D.5	254.777.682	165.574.936
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.032.790.764	636.702.546
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	396.671.985	327.239.928
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	
Beban Lain-lain	D.11	-	
JUMLAH BEBAN		2.696.604.412	2.087.950.952
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		2.183.920.793	4.108.409.113
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset non lancar		111.634.900	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		111.634.900	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
Beban Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang		-	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		111.634.900	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		2.295.555.693	4.108.409.113
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBPN		-	
Beban Perjalanan Dinas		-	
Beban Persediaan		-	
SURPLUS/DEFISIT LO		2.295.555.693	4.108.409.113

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Triwulan IV TA 2024	Triwulan IV TA 2023
EKUITAS AWAL	E.1	5.522.206.881	5.519.602.550
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	2.295.555.693	4.108.409.113
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(1.799.563.917)	(4.105.804.782)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	495.991.776	2.604.331
EKUITAS AKHIR	E.7	6.018.198.657	5.522.206.881

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum, Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tanggal 30 Juni 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KM.1/2019 tanggal 30 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuanga Bagian Anggaran 015
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kantor Pelayanan.

Profil

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Jayapura, Lantai 4, Jalan Ahmad Yani No.8, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura mempunyai tugas dan fungsi dalam memberi bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Rencana Strategis

Untuk mewujudkan tujuan di atas KPKNL Jayapura berkomitmen dengan visi ***“menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi pengelola***

keuangan negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
- Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan Masyarakat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan demikian, hingga saat ini Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku membawahi 4 (empat) kantor vertikal di daerah, yaitu KPKNL Jayapura, KPKNL Biak, KPKNL Sorong, dan KPKNL Ambon.

*Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
 - Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
 - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - d. Tanah
 - e. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - f. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Nilai Kinerja
Organisasi

A.6. Nilai Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi, Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nilai Kinerja Organisasi pada KPKNL Jayapura Tahun 2024 sebesar 108,85. Nilai tersebut diperoleh dari IKU *Stakeholder Perspective* (30%) sebesar 93,17, IKU *Customer perspective* (20%)

sebesar 107,93, IKU *Internal Process Perspective* (25%) sebesar 120, dan IKU *Learning and Growth Perspective* (25%) sebesar 117,24.

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jayapura meningkat 0,04% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 108,81. Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL Jayapura mengalami peningkatan capaian kinerja.

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jayapura 2024

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perek									93,17	93,17
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal									116,94	
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal						100,00%			86,86	107,93
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien									120	
Internal Process Perspective (25%)											
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif									120	
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif									120	120
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional									120	
Learning and Growth Perspective (25%)											
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif									111,21	
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel									120	
10	Komunikasi publik yang efektif									120	117,24
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah									117,76	
NKO											108,85

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPKNL Jayapura telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Anggaran pada DIPA

Uraian	2024	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	3.096.619.000	3.096.619.000
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	12.790.000	12.790.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.171.153.000	1.171.153.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0
Jumlah Pendapatan	4.280.562.000	4.280.562.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.340.405.000	2.424.367.000
Belanja Modal	906.990.000	906.990.000
Jumlah Belanja	3.247.395.000	3.331.357.000

Realisasi
Pendapatan
Rp4.992.160.105

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.992.160.105 atau mencapai 117 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 4.280.562.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura hanya terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	3.096.619.000	2.585.580.218	83,5
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12.790.000	55.845.389	436,63
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	-	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.171.153.000	2.239.099.598	191,19
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	111.634.900	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-
Jumlah	4.280.562.000	4.992.160.105	116,62

Pada Triwulan IV TA 2024 realisasi pendapatan paling besar terdapat pada pendapatan bea lelang kelas I sebesar Rp2.585.580.218. Realisasi pendapatan lainnya berasal dari pendapatan bea lelang pejabat pegadaian sebesar Rp 2.239.099.598, pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp 111.634.900, dan pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar Rp 55.845.389.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp3.200.265.888*

B.2. Belanja

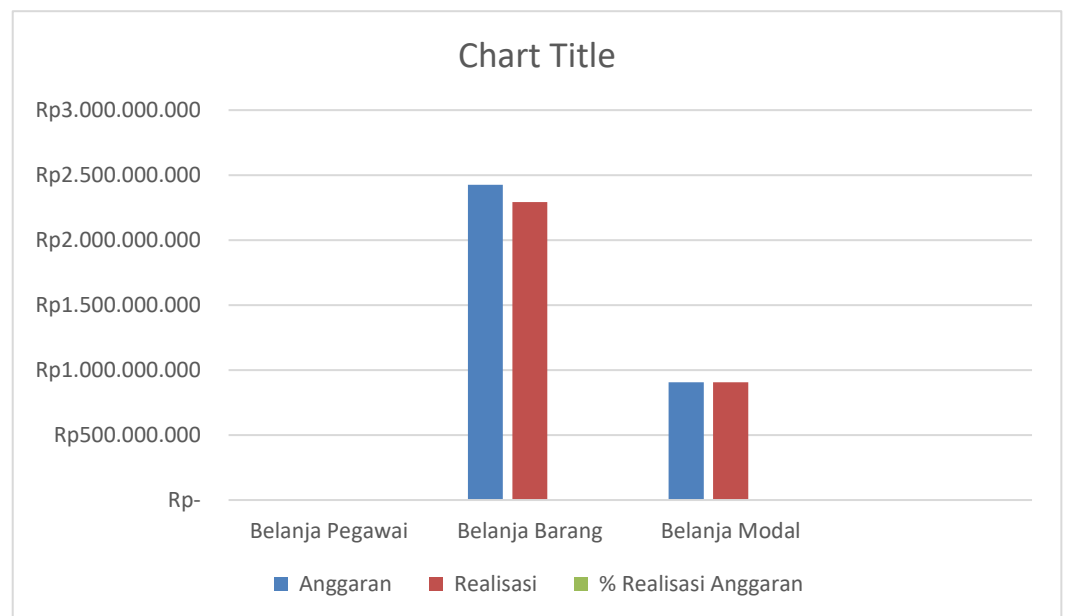
Realisasi Belanja instansi pada Triwulan IV TA 2024 adalah sebesar Rp 3.200.265.888 atau 96 persen dari anggaran belanja setelah revisi yaitu sebesar Rp 3.331.357.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Triwulan IV TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.424.367.000	2.293.279.888	94,59%
Belanja Modal	906.990.000	906.986.000	100,00%
Total Belanja Kotor	3.331.357.000	3.200.265.888	96,06%
Pengembalian Belanja		-	

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Tabel 2.4 Perbandingan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023



Realisasi Belanja Triwulan IV TA 2023 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp2.293.279.888 atau 94,59% dari pagu anggaran sebesar Rp2.424.367.000 dan Belanja Modal sebesar Rp0 atau 0% dari pagu anggaran sebesar Rp0. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena target capaian output dari masing-masing kegiatan rincian output mengalami kenaikan, sehingga pelaksanaan kegiatan termasuk dengan belanja dari seksi teknis dan operasional kantor mengalami kenaikan. Sedangkan untuk Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama karena pada Tahun Anggaran 2024 terdapat Belanja Modal berupa pengadaan kendaraan dinas roda 4 operasional dan fungsional, pengadaan lampu studio, *mic wireless*, mesin kopi, *mic (wired)*, dan A.C ½ PK. Perbandingan realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.293.279.888	1.718.285.617	33,46%
Belanja Modal	906.986.000	343.999.000	163,66%
Jumlah	3.200.265.888	2.062.284.617	197,12%

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Realisasi belanja pegawai TA 2024 sama dengan TA 2023, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi Belanja Pegawai.

*Belanja Barang
Rp2,293,279,888*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,293,279,888 dan Rp1,718,285,617. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 33,46% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal

ini terjadi karena target capaian output dari masing-masing kegiatan rincian output mengalami kenaikan sehingga pelaksanaan kegiatan mulai dari belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dalam negeri mengalami kenaikan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 sesuai dengan trajektori yaitu sebesar 94,28% dari pagu anggaran TA 2024, hal ini target capaian output dari masing-masing kegiatan rincian output mengalami kenaikan, sehingga pelaksanaan kegiatan mulai dari belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dalam negeri mengalami kenaikan.

Tabel 2.6 Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	679.697.336	714.342.036	(4,85)
Belanja Barang Non Operasional	132.164.824	58.532.500	125,80
Belanja Barang Persediaan	89.563.700	82.797.800	8,17
Belanja Jasa	96.615.882	60.335.799	60,13
Belanja Pemeliharaan	254.777.682	165.574.936	53,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.040.460.464	636.702.546	63,41
Jumlah Belanja Kotor	2.293.279.888	1.718.285.617	33,46
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	2.293.279.888	1.718.285.617	33,46

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp906.986.000*

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 906.986.000 dan Rp 343.999.000. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 163,7% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pada DIPA TA 2023 tidak terdapat anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sehingga tidak terdapat realisasi belanja.

Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI Tahun Anggaran 2024	REALISASI Tahun Anggaran 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	906.986.000	343.999.000	163,7%
Jumlah Belanja Kotor	906.986.000	343.999.000	163,7%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	906.986.000	343.999.000	163,7%

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rekening Virtual Account merupakan pengganti dari rekening BRI (0307-01-000108-30-1) karena telah dilakukan penutupan pada rekening tersebut.

Tabel 3.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Rekening Virtual Account (650095381291000)	-	-
Uang Tunai	-	-
Kwitansi UP belum di SPJ kan	-	-
Saldo Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp14.966.000.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.966.000 dan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan setoran uang jaminan Lelang dimana pelaksanaan lelang tersebut dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2025. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan dimana sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 3.2 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	14.966.000	-
Jumlah	14.966.000	-

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp14.966.000.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.966.000 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	-	-
Biad PPN yang belum disetor ke Kas Negara	-	-
Dana Pihak Ketiga	14.966.000	-
Jumlah	14.966.000	-

Piutang PNBPN
Rp0

C.4 Piutang PNBPN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2024 tidak memiliki piutang PNBPN. Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Tabel 3.4 Rincian Piutang PNBPN

Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2024 tidak memiliki Bagian Lancar TP/TGR. Saldo Bagian Lancar TP/TGR per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2024 tidak memiliki Bagian Lancar TPA. Saldo Bagian Lancar TPA per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2024 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Tabel 3.5 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka
Rp12.500.000

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 202 masing-masing adalah sebesar Rp12.500.000 dan Rp12.500.000. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 3.6 Rincian Belanja Dibayar di Muka

Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Pembayaran Sewa Gudang Arsip	12.500.000	12.500.000
Jumlah	12.500.000	12.500.000

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Rp 0.

C.9 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Jenis	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp72.487.533

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp72,487,533 dan Rp80,454,975. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rincian Persediaan

Persediaan	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Barang Konsumsi	72.487.533	80.454.975
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	72.487.533	80.454.975

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena

kelalaiannya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2024 tidak memiliki Tagihan TP/TGR. Saldo Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2024 tidak memiliki TPA. Saldo TPA per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2024 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tabel 3.9 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp.2.564.512.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Jayapura per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.564.512.000. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1000m2	Jalan Lembah Sunyi IV, Angkasapura, Jayapura Utara	2.564.512.000
Jumlah			2.564.512.000

Peralatan dan
Mesin
Rp3.841.904.123

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp3.841.904.123 dan Rp 3.142.218.123. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	3.142.218.123
Mutasi tambah:	906.986.000
Mutasi kurang:	207.300.000
Saldo per 31 Desember 2024	3.841.904.123
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.443.444.434)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	1.398.459.689

Gedung dan
Bangunan
Rp 2.520.226.000

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 2.520.226.000 dan Rp2.495.492.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	2.520.226.000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	2.520.226.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(356,818,752)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	2,163,407,248

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi transaksi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp2.000.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.000.000. Aset tetap tersebut berupa koleksi buku perpustakaan.

Tabel 3.13 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	2.000.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	2.000.000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.000.000

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0.*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2024 tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.2.800.263.186 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp2.800.263.186 dan Rp2.798.010.335. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	2.564.512.000	-	2.564.512.000
2	Peralatan dan Mesin	3.841.904.123	(2.443.444.434)	1.398.459.689
3	Gedung dan Bangunan	2.520.226.000	(356.818.752)	2.163.407.248
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-	0
5	Aset Tetap Lainnya	2.000.000	-	2.000.000
	Akumulasi Penyusutan	8.928.642.123	(2.800.263.186)	6.128.378.937

Aset Lain-Lain Rp. 0 **C.22 Aset Lain-Lain** Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp157.750.000. Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2023 merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Namun, untuk per tanggal 31 Desember 2024 sudah tidak ada aset lain-lain.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp157.750.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp36.000.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp23.014.679.*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp23.0114.679 dan Rp1.693.882. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0.*

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum ditagihkan tersebut merupakan transaksi atas UP yang belum diajukan SPM GUP ke KPPN.

*Ekuitas
Rp5.684.238.108.*

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.018.198.657 dan Rp 5,522,206,881. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNB
Rp4.880.525.205*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4,880,525,205. dan Rp6,196,360,065. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan Triwulan TA 2023

URAIAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4.880.525.205	6.196.360.065	-21,24%
Jumlah	4.880.525.205	6.196.360.065	-21,24%

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa PNBPN Lainnya meliputi Pendapatan Bea Lelang, Pendapatan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penyeteroran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak diambil oleh yang berhak, serta Pendapatan Anggaran Lain-Lain.

*Beban Pegawai
Rp0*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp97.531.142.*

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp97.531.142 dan Rp123.529.325. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	97.531.142	123.529.325	-21,05%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	97.531.142	123.529.325	-21,05%

*Beban Barang
dan Jasa
Rp914.832.839*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp914.832.839 dan Rp834.904.217. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa di TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,209 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos	60.660.600	45.779.580
Belanja Honor Operasional Satker	64.724.000	123.690.000
Belanja Barang Operasional Lainnya	0	61.600.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30.000	0
Belanja Bahan	132.134.824	58.532.500
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13.062.200	14.524.583
Belanja Langganan Telepon	1.319.379	1.442.581
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0	34.686.600
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	0	0
Belanja Keperluan Perkantoran	547.601.836	435.648.373
Belanja Jasa Profesi	15.300.000	9.000.000
Belanja Sewa	80.000.000	50.000.000
Jumlah	914.832.839	834.904.217

*Beban
Pemeliharaan
Rp254.777.682.*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp254.777.682 dan Rp165.574.936. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan di TA 2024 mengalami kenaikan 53,57 persen karena adanya pemeliharaan pada kendaraan dinas roda 4. Pada tahun 2024 terdapat belanja modal 2 unit kendaraan dinas roda 4, sehingga menimbulkan beban pemeliharaan peralatan dan mesin. Kemudian pada tahun 2024 terdapat pengamanan/pemeliharaan BMN berupa eks BMN *idle*. Rincian beban pemeliharaan untuk 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	40.500.000	0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	214.277.682	165.574.936
Jumlah	254.777.682	165.574.936

*Beban Perjalanan Dinas
Rp1.032.790.764.*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.032.790.764 dan Rp636.702.546. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 62,2% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya karena target capaian output dari masing-masing kegiatan rincian output mengalami kenaikan sehingga pelaksanaan kegiatan belanja perjalanan dinas dari seksi teknis dan operasional kantor mengalami kenaikan. Setiap seksi terutama seksi teknis perlu melakukan beberapa kegiatan mulai dari koordinasi, sosialisasi, penilaian, pengecekan fisik, verifikasi data, hingga penggalan potensi lelang. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	904.686.764	576.952.546	56,80%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	128.104.000	59.750.000	114,40%
Jumlah	1.032.790.764	636.702.546	62,2%

Beban Penyusutan dan

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Amortisasi
Rp396.671.985

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp396.671.985 dan Rp 327.239.928. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.6 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	342.758.415	273.326.358	25,40%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53.913.570	53.913.570	0,00%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digu	-	-	0,00%
Jumlah Penyusutan	396.671.985	327.239.928	21,22%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	396.671.985	327.239.928	21%

Surplus / Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran yang Lalu		
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu		
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.522.206.881.

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.522.206.881 dan Rp5.519.602.550.

Defisit LO
Rp2.295.555.693.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.295.555.693 dan Rp4.108.409.113. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian atas aset berupa persediaan yang disebabkan oleh perubahan harga perolehan persediaan. Penyesuaian Nilai Aset berupa persediaan untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap (Revaluasi BMN). Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2023 pada KPKNL Jayapura adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Rp0*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Serta koreksi karena adanya Reklasifikasi kode barang pada pencatatan di SIMAK-BMN. Koreksi pencatatan aset tetap untuk TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi Lain-lain
Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp1.799.563.917.*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.799.563.917 dan Rp 4.105.804.782. Transaksi antar entitas ini merupakan selisih antara akun ditagihkan ke entitas lain dengan jumlah sebesar Rp3.192.596.188 dikurang akun ditagihkan dari entitas lain dengan jumlah sebesar Rp4.992.160.105. Akun ditagihkan ke entitas lain merupakan realisasi belanja, sedangkan akun ditagihkan dari entitas lain merupakan realisasi pendapatan.

*Ekuitas Akhir
Rp5.684.238.108.*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 6,018,198,657 dan Rp 5,522,206,881.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

*Program Prioritas
Nasional
Rp80.910.050*

F.1 Pengungkapan Capaian Kinerja Prioritas Nasional

Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN) merupakan Program Prioritas Nasional. Realisasi belanja pada program Prioritas Nasional per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp80.910.050 terserap 94,69% dari total anggaran yang tersedia sejumlah Rp85.450.000. Realisasi volume keluaran per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebanyak 5 unit tercapai 100% dari target keluaran sebanyak 5 unit.

Tabel 5.1 Pengungkapan Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional

No	Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Rincian Output
1.	Pengelolaan Aset BUN (UAK)	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	Rp85.450.000	Rp.80.910.050	94,69%	5 Aset	5 Aset	100%

F.2 Pengungkapan Pejabat Pengelola Keuangan KPKNL Jayapura

Pada 31 Desember 2024 Pejabat Pengelola Keuangan pada tahun di Lingkup KPKNL Jayapura adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Daniel H.P. Panggabean
Pejabat Pembuat Komitmen : Lady Diana Capelle
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Andy Heriwibowo
Bendahara Pengeluaran : Fawwaz Wafda Mujahid